

## ABSTRAK

AANG SUTISNA : Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pemikiran Politik Khomeini

Fenomena penting yang mewarnai transformasi masyarakat global pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20 adalah menguatnya tuntutan demokrasi. Banyak negara yang mengalami pergeseran dari sistem otoritarian ke arah sistem demokrasi. Revolusi Islam Iran 1978-1979 yang dimotori Ayatullah Khomeini merupakan salah satu fenomena yang paling spektakuler yang meruntuhkan sistem monarki-absolut menjadi Republik Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui pandangan Ayatullah Khomeini tentang demokrasi, (2) mengetahui landasan pemikiran Ayatullah Khomeini tentang demokrasi, (3) mengetahui realisasi pemikiran demokrasi Ayatullah Khomeini dalam aktivitas politik, dan (4) mengetahui sejauh mana relevansi pandangan demokrasi Ayatullah Khomeini dengan prinsip siyasah syar'iyah.

Penelitian ini bertolak dari munculnya fenomena Revolusi Islam Iran dan besarnya peranan yang dimainkan Ayatullah Khomeini baik sebagai pemimpin Revolusi Islam maupun sebagai pendiri Republik Islam Iran.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun analisa data dilakukan dengan memberikan analisis kritis terhadap paradigma demokrasi yang dikemukakan Ayatullah Khomeini.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pandangan Ayatullah Khomeini tentang demokrasi berbeda dengan demokrasi murni dan demokrasi liberal, di mana kebebasan demokratis mesti dibatasi dengan hukum dan harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum Islam dan Konstitusi. Adapun yang melandasi pemikiran Ayatullah Khomeini tentang demokrasi adalah keyakinannya yang mendalam terhadap ajaran Islam madzhab Syi'ah dan realitas sosial-politik Iran yang menyertainya. Tentang bagaimana realisasi pemikiran demokrasi dalam aktivitas politik Ayatullah Khomeini, dapat dilihat dari besarnya keterlibatan Ayatullah Khomeini dalam mewujudkan struktur pemerintahan Republik Islam Iran sebagaimana terkandung dalam Konstitusi Republik Islam Iran 1979. Pandangan demokrasi Ayatullah Khomeini relevan dengan prinsip siyasah syar'iyah dalam hal: prinsip kedaulatan rakyat atau musyawarah (*syura*), prinsip kebebasan (*al-hurriyah*), prinsip persamaan di depan hukum (*al-musawah*), dan prinsip distribusi kekuasaan.